

# Menanggulangi Jumlah Penduduk Miskin

Selasa, 6 Oktober 2015 | Dibaca 189 kali

**Oleh: Dr Muammar Khadafi SE., Msi.,Ak.**

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 Juta jiwa menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, di bawah Tiongkok, India dan Amerika. Jumlah tersebut juga menjadi tanggungjawab negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Kemiskinan menjadi persoalan di tiap negara, tak terkecuali di negara maju kemiskinan menjadi permasalahan serius, karena menjadi dasar penetapan suatu negara maju. Terlebih lagi di negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan menjadi problem yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Tahun 2014 pendapatan perkapita Indonesia terbilang rendah, yaitu \$ 4,700 atau dalam kurs pada saat itu Rp. 12.700 atau sekitar Rp. 5.000.000/bulan, angka ini bukanlah angka yang besar jika dibandingkan dengan Malaysia \$ 13.000 dan Singapura \$51.000.

Pendapatan perkapita yang rendah di Indonesia menambah tugas panjang pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan, yang jumlahnya pada September 2014 berjumlah 27,73 juta jiwa atau 10,96 persen dari total jumlah penduduk, angka ini naik pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang atau 11,22 persen dari jumlah penduduk Indonesia (Kompas 15/9) Jadi ada sekitar tambahan 860.000 jumlah penduduk miskin di Indonesia, ini belum termasuk yang tidak terdata seperti di wilayah pedalaman pedesaan. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini disebabkan oleh melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, sementara pendapatan berkurang dan tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar penduduk.

Mekanisme penanggulangan angka kemiskinan belum sepenuhnya berhasil diterapkan pemerintah. Pemerintah dan DPR lebih fokus pada isu politik yang menyangkut hajat mereka, bukan pada mencari jalan keluar mengatasi kemiskinan. Padahal hajat politik tidak memiliki korelasi dengan kemiskinan, seharusnya ketika telah mendapatkan amanah, maka tugas mereka juga harus berubah, dari mengurus kepentingan partai menjadi pengurus kepentingan masyarakat.

## **Kedaulatan Ekonomi**

Pemerintah bertanggungjawab atas setiap permasalahan yang berdampak pada masyarakat, jika jumlah penduduk miskin meningkat, berarti ada masalah kemandirian ekonomi yang belum terselesaikan, dan hal ini menjadi semakin berdampak buruk di tengah kondisi ekonomi negara yang belum menunjukkan perubahan pada semester kedua 2015, bahkan di tengah menguatnya dolar juga berdampak pada merosotnya nilai rupiah hingga menembus angka Rp. 14.300, dan tentu saja nilai ini berdampak pada melonjaknya harga-harga bahan pokok di pasaran, yang semakin membuat kondisi masyarakat miskin lebih terpuruk.

Kedaulatan ekonomi di bidang pangan memang terus dilakukan oleh pemerintah, namun negara tidak siap menghadapi iklim ekonomi global yang sudah terlalu jauh mencampuri kemandirian ekonomi negara, sehingga upaya yang dilakukan pemerintah tidak terlalu berdampak signifikan bagi pembenahan ekonomi nasional. Di tengah arus globalisasi yang telah merambah Indonesia, membuat penduduk ini semakin terjepit dengan keterbatasan yang ada. Globalisasi memaksa semua serba maju, namun kemampuan yang dimiliki masyarakat tidak mengalami perubahan. Akhirnya, karena tidak mampu bertahan diantara arus globalisasi, membuat

penduduk mengalami kemerosotan kelayakan hidup.

Tidak hanya bagi masyarakat biasa yang tidak memiliki pekerjaan tetap, bagi kalangan usahawan menengah ke bawah juga merasakan dampaknya. Arus impor masuk tanpa kendali di tengah produksi nasional yang belum siap bersaing, akhirnya hampir setiap sektor produksi di kuasai asing dari mulai kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) hingga kebutuhan sekunder dan tersier. Arus ini memaksa produksi dalam negeri berhenti bergerak, hingga akhirnya menimbulkan angka baru penduduk miskin karena kehilangan pekerjaan.

Perjanjiaan Indonesia dengan WTO, dimana anggotanya bebas melakukan ekspor ke negara anggota, menjadikan Indonesia sasaran pasar empuk dan menggiurkan, akhirnya produk kalah bersaing, Indonesia hanya mampu “mengekspor” tenaga kerja saja ke luar negeri. Wajar saja, globalisasi tetap tidak mampu membawa lapangan pekerjaan, karena jumlah pencari kerja lebih banyak dari pada jumlah lapangan pekerjaan yang disediakan.

### **Kemandirian Ekonomi**

Sebagai negara yang merdeka, sudah seharusnya negara ini, mengatur sendiri negaranya, kendati sakit di awal, namun jika membawa perubahan nyata di kemudian hari, maka penduduk Indonesia akan ikhlas menerima.

Menanggulangi kemiskinan tidak dengan cara memberi makan dengan menurunkan beras murah (bulog), karena berdampak pada pengusaha kecil pedagang beras, akhirnya rakyat miskin tertolong untuk beberapa bulan, namun pengaruh ekonomi mikro menjadi tertanggung, dimana daya jual beras menurun. Kebijakan subsidi juga tidak menurunkan angka kemiskinan, apalagi sampai ada bantuan uang (BLT), akan lebih berdampak buruk pada jumlah penduduk miskin.

Berkaca pada negara maju seperti Amerika yang pernah mengalami masa krisis Tahun 1930an, berubah menjadi raksasa ekonomi pada Tahun 1960an. Dan Tiongkok yang pada pada Tahun 1970an menutup diri dari dunia luar, kemudian berhasil membuktikan kemandirian ekonomi yang kini dirasakannya. Indonesia harus mampu bangkit meniru kemajuan ekonomi pada dua negara tersebut.

Sebagai catatan, Tiongkok memiliki formula khusus meningkatkan pertumbuhannya dengan melawan Amerika. Kendati mata uang Amerika lebih tinggi, namun tidak berpengaruh pada Tiongkok. Jika kondisi mata uang di Amerika tinggi, maka akan terjadi peningkatan nilai mata uang, dan otomatis harga produksi Amerika lebih tinggi untuk diekspor ke luar, sementara Tiongkok menjaga mata uangnya tetap di bawah, agar nilai produksinya rendah, dan mampu membanjiri pasar Amerika dengan harga murah, akhirnya produk Amerika kalah dengan produk Cina, hasilnya nilai ekspor Tiongkok lebih tinggi dari Amerika.

Tiongkok dapat menjadi contoh, dimana mereka memainkan peranan besar dalam meningkatkan kualitas perekonomian negaranya. Namun peningkatan pertumbuhan ekonomi juga tidak menjamin penurunan angka kemiskinan, seperti di Kolombia dan Venezuela. Intinya kemandirian ekonomi di bidang produksi harus dilakukan, guna menurunkan angka kemiskinan.

Upaya logis yang harus dilakukan adalah dengan memajukan pendidikan warga negaranya, dan berusaha memupuk sektor usaha kecil yang harus difasilitasi pemerintah, dan menjadi eksportir. Dengan demikian, penduduk miskin memiliki lapangan usaha, dan mampu memproduksi produk usaha dengan harga murah. Pemerintah harus mampu membaca kebutuhan internasional terhadap suatu produk, dan membentuk unit usaha tersebut di Indonesia, guna melawan produk usaha negara lain, dengan kualitas tinggi dan harga rendah.

Jika pola ini di bangun, maka komoditas yang ada di Indonesia bisa di ekspor ke luar negeri. Beberapa daerah dengan komoditas unggulan ditentukan pemerintah, untuk selanjutnya diupayakan pengelolaannya dengan pendidikan dan penyediaan mesin produksi bantuan pemerintah, hingga setiap daerah siap dengan

komoditasnya. Langkah ini terbilang efektif, dari pada terus berharap pada sektor besar, yang hanya sedikit menurunkan angka kemiskinan. \*\*\*

**Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.**